

# Kegiatan Administrasi Keuangan, Akuntansi, Pajak, SDM dan Umum Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP

## Author

Staf Keuangan, Akuntansi dan Pajak Proyek Sumbu Kebangsaan Tahap II,  
NIP : 23-871 Raden Achmad Fajri Syaizamari  
e-mail: fajriachmad22@gmail.com

---

### Key Words:

ERP, Odoo, Finance Accounting,  
Tax, HC

**Abstrak:** PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan salah satu perusahaan Konstruksi terkemuka di Indonesia yang dimiliki Negara (BUMN). PT Brantas Abipraya (Persero) dipercaya untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP. Management administrasi proyek tentunya sangat penting untuk membuat pertanggungjawaban terhadap proses konstruksi yang telah dikerjakan. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan system informasi yang mampu mengakomodasikan keperluan system informasi untuk departemen-departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. Penting untuk memastikan siklus proyek berjalan dengan tepat dan detail sehingga informasi yang disampaikan nantinya dapat dipertanggungjawabkan khususnya pada laporan keuangan proyek. Laporan Keuangan harus dapat dipahami, relevan dan dapat diandalkan. Artikel ini menekankan pada pengalaman langsung penulis sebagai Staf Akuntansi, Keuangan, Pajak, SDM & Umum Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP bertujuan untuk berbagi pengetahuan mengenai Persiapan dan Pelaksanaan Proyek.

---

Syaizamari. (2023). Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP. *Knowledge Management*. Staf Keuangan, Akuntansi, dan Pajak 23-871.

---

## PENDAHULUAN

Sumbu Kebangsaan di KIPP mengandung makna filosofis bahwa kesejahteraan berasal dari tiga keharmonisan hubungan yakni manusia dengan Tuhan manusia dengan alam lingkungan dan manusia dengan sesamanya. Sumbu Kebangsaan direncanakan sebagai wadah pertemuan nasional yang bersifat formal dan seremonial, sekaligus representasi kesatuan suara masyarakat Indonesia, yang juga mengadaptasi dari pengembangan konsep alun-alun. Ruang-ruang kota ini juga diharapkan menjadi representasi kuat ke-Bhinneka-an Indonesia serta nilai budaya nusantara, dengan menciptakan area pusat keragaman unsur budaya dan sejarah yang dikelilingi dengan fungsi-fungsi atau kawasan pendukung perkotaan. Sumbu ini memanjang dari Istana Presiden sampai dengan Pancasila Eco Park dan memuat berbagai macam ruang kota, seperti plaza, museum/galeri, taman kota, serta dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda. Sumbu Kebangsaan terdiri dari Plaza Seremoni serta Plaza Bhinneka A, B dan C.

Sumbu Kebangsaan terletak pada Sub-WP 1A KIPP yang akan dibangun dalam jangka waktu tahun 2022 hingga 2024. Pentahapan pembangunan terdiri dari Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I untuk Plaza Seremoni, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II untuk Plaza Bhinneka A, B, dan C.

Plaza Bhinneka Tunggal Ika merupakan segmen Sumbu Kebangsaan yang dimaknai sebagai simbol peradaban masa sekarang. Peruntukan aktivitas pada Plaza Bhinneka Tunggal Ika yaitu multiprogram yang mendorong interaksi sosial dan pembangunan komunitas sekaligus representasi keragaman seni dan budaya Indonesia. Plaza ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan pemerintahan kantor (BUMN), yang dihubungkan dengan ruas shared street sebagai area perluasan dari plaza.

Sumbu Tripraja terletak pada Sub-WP 1A KIPP yang akan dibangun dalam jangka waktu tahun 2023 hingga 2024. Sumbu Tripraja terdiri dari Plaza Legislatif dan Plaza Yudikatif. Plaza Legislatif dan Yudikatif merupakan segmen Sumbu Tripraja yang dimaknai sebagai simbol peradaban masa sekarang. Peruntukan aktivitas pada Plaza Legislatif dan Yudikatif yaitu multiprogram yang mendorong interaksi sosial dan pembangunan komunitas sekaligus representasi keragaman seni dan budaya Indonesia. Plaza Legislatif ini terletak di sisi timur Istana Negara. Plaza Yudikatif terletak di sisi barat Istana Negara.

Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap IA IKN sebagai kota pusat pemerintahan yang mencerminkan identitas bangsa; mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan; serta mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional; yang aman, nyaman, dan tahan terhadap bencana. Daya tahan terhadap bencana salah satunya adalah ketahanan terhadap bencana kebakaran. Dalam rangka mewujudkan ketahanan terhadap bencana kebakaran, diperlukan sistem proteksi kebakaran skala perkotaan.

Pembangunan sistem proteksi kebakaran skala perkotaan dalam KIPP IKN akan dilaksanakan dalam beberapa pentahapan. Tahap pertama akan dibangun Pos Komando dan Sub Pos Pemadam Kebakaran pada Sub-WP 1A KIPP IKN.

Sumber dana Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun kegiatan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 - 2024.

Dalam Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun kegiatan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP ini diperlukan biaya Rp 896.107.257.000,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun kegiatan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP adalah 450 hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (PHO).

PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan salah satu perusahaan Konstruksi terkemuka di Indonesia yang dimiliki Negara (BUMN). PT Brantas Abipraya (Persero) dipercaya untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP.

Proses bisnis lingkup Proyek PT Brantas Abipraya (Persero) diawali dengan perencanaan, pengerjaan, pengawasan dan perbaikan. Proses bisnis tersebut tentunya harus terintegrasi dengan baik sehingga pengelolaan data dapat tersimpan dengan baik. Pengelolaan data mulai dari Perencanaan yaitu RBP, AKP, RMP dan RMK3L; kemudian pada proses berikutnya ada Pelaksanaan yaitu Pembuatan RKDK, rekrutmen pegawai, kontrak kerja karyawan, kontrak vendor, dokumen pembayaran scf, penarikan termijn, perpajakan, laporan personalia, dan pembuatan laporan keuangan; tidak hanya itu di lingkup proyek harus dilakukan pengawasan melalui wasdal keuangan dan matching cost, evaluasi cash basis dan cash balance. Pada proses terakhir dilakukannya Perbaikan atas evaluasi yang telah dilakukan.

Management administrasi proyek tentunya sangat penting untuk membuat pertanggungjawaban terhadap proses konstruksi yang telah dikerjakan. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan system informasi yang mampu mengakomodasikan keperluan system informasi untuk departemen-departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. Penting untuk memastikan siklus proyek berjalan dengan tepat dan detail sehingga informasi yang disampaikan nantinya dapat dipertanggungjawabkan khususnya pada laporan keuangan proyek. Laporan Keuangan harus dapat dipahami, relevan dan dapat diandalkan. Artikel ini menekankan pada pengalaman langsung penulis sebagai Staf Akuntansi, Keuangan dan Pajak Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP bertujuan untuk berbagi pengetahuan mengenai Persiapan dan Pelaksanaan Proyek.

## LANDASAN TEORI

**Master RBP-AKP** Master RBP (Rencana Biaya Pelaksanaan) merupakan acuan anggaran biaya proyek yang sifatnya sementara dan dibuat oleh Unit Bisnis.

**Master AKP (Arus Kas Pelaksanaan)** adalah Proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya sementara dan dibuat oleh Unit Bisnis.

Master RBP-AKP digunakan sebagai acuan pelaksanaan sementara sampai dengan pengesahan dokumen PP. Pendapatan, Biaya dan Kontribusi didalam Master RBP- AKP nilainya mengacu kepada nilai pada form Finalisasi Hasil Tender (FHT) dan Finalisasi Penawaran sesuai Prosedur Penyusunan Penawaran No. 2-000-20-02.

Master RBP-AKP dibuat oleh GM Unit Bisnis paling lama 1 (satu) minggu setelah PHT. Master RBP disetujui oleh SM Produksi, sedangkan Master AKP disetujui oleh SM Keuangan. Dokumen ini sebagai dasar otorisasi pemberian dana alokasi proyek dan berlaku paling lama 1 (satu) bulan. Selanjutnya PMberkewajiban membuat Dokumen Perencanaan Proyek (PP).

**Perencanaan Proyek (PP)** adalah rencana Pelaksanaan Proyek yang dibuat oleh Project Manager (PM) sebagai acuan pengawasan dan pengendalian Proyek yang terdiri dari:

Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) yang terdiri dari :

- Biaya Langsung (BL) adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pekerjaan yang tercantum pada BoQ (Bill of Quantity) dan support item.
- Biaya Tak Langsung (BTL), terdiri dari biaya umum, administrasi dan biaya pengurusan.
- Biaya Persiapan dan Penyelesaian adalah biaya untuk persiapan pekerjaan dan biaya pada masa pemeliharaan.
- Biaya Pembebanan/Investasi
- Biaya Bank dan PPh final jasa konstruksi

**Arus Kas Pelaksanaan (AKP)** merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

**Rencana Mutu Proyek (RMP)** adalah suatu pedoman jaminan mutu dan pelaksanaan pekerjaan, agar produk akhir pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum di dalam kontrak.

**Manajemen Risiko** adalah mengidentifikasi risiko yang berpotensi menurunkan target hasil usaha, serta membuat rencana pengendalian risiko

**Rencana Kebutuhan Dana Kerja (RKDK)** adalah kebutuhan dana bulanan untuk operasional dan non operasional Proyek dan Unit Bisnis. Berikut ini Batasan maksimum Plafon RKDK Proyek :

No.	Progress Proyek	Batasan Alokasi Anggaran
1.	s.d 25 %	Devisit Maksimal = 5% Nilai Kontrak terhadap Nilai Biaya RBP dari Realisasi Pendapatan
2.	25% s.d 50%	Devisit Maksimal = 5% terhadap Nilai Biaya RBP dari Realisasi Pendapatan
3.	51% s.d 75%	Devisit Maksimal = 2% terhadap Nilai Biaya RBP Dari Realisasi Pendapatan
4.	>75%	Maksimal sesuai Nilai Biaya RBP dari Realisasi Pendapatan

**Biaya Umum** adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan namun tidak berhubungan langsung dengan biaya material, peralatan, upah mandor, dan subkontraktor. Pengeluaran yang dibebankan pada proyek tetapi tidak dimasukkan pada biaya material, upah kerja, atau peralatan, yaitu: biaya telepon, biaya pegawai, administrasi kantor, administrasi rumah tangga, transportasi dan perjalanan dinas.

**Panjar Kerja** merupakan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan berdasarkan penugasan atau rencana kegiatan sesuai fungsi pengambil/pemegang panjar.

Adapun syarat-syarat pengajuan panjar kerja menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Brantas Abipraya (Persero) Bagian Keuangan – Penyusunan Laporan Keuangan No. 2-000-56-02/10 halaman 11, yaitu :

- Permohonan panjar kerja diisi oleh pemegang panjar sesuai form yang berlaku dan diajukan ke penanggungjawab panjar paling lambat satu hari sebelum pengeluaran atau pembayaran dilakukan

- b. Panjar kerja harus sudah dipertanggungjawabkan penggunaannya paling lambat dua minggu setelah tanggal pengambilan panjar yang disertai dengan perhitungan pelunasan panjar kerja, bukti pembayaran atau pengeluaran kepada rekanan dengan lengkap, benar dan sah.

**Supply Chain Financing (SCF) /OAF (Open Account Financing)** merupakan instrument/produk Bank yang diberikan dalam rangka pembayaran atas pengadaan barang dan jasa kepada rekanan dengan sistem Forfaiting.

**Forfaiting** adalah transaksi pembelian hak tagih berdasarkan dokumen yang telah mendapat akseptasi berupa *Banker's Acceptance (B/A)* dari Bank Koresponden dengan *discount charges* tanpa hak regres.

**Hak regres atau hak recourse** dalam kamus Bank Indonesia adalah Hak Pemegang Surat Wesel/cek/surat sanggup untuk menagih penarik/endosan/avalis guna mendapatkan pembayaran jika pihak tertarik menolak melakukan pembayaran (*recht van regres*) dan *Recourse* juga diartikan hak alih bayar.

**Laporan keuangan** adalah produk akhir dari suatu proses kegiatan Akuntansi yaitu tata cara mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, mengkonsolidasikan transaksi – transaksi yang telah dilaksanakan, sampai dengan menginterpretasikan ke dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang harus dibuat pada setiap akhir periode yang telah ditetapkan. Transaksi yang terjadi dibagi menjadi tiga, yaitu penerimaan, pengeluaran dan memorial. Penerimaan adalah uang masuk yang diterima oleh unit kerja/unit usaha perusahaan. Penerimaan dibagi menjadi penerimaan uang yang diterima unit kerja/unit usaha di kas atau bank yang bersumber dari intern maupun ekstern perusahaan serta penerimaan bukan uang yang diterima perusahaan tetapi mempunyai nilai transaksi. Pengeluaran adalah uang keluar yang dilakukan unit kerja/unit usaha perusahaan. Memorial adalah transaksi yang tidak berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas/bank. Memorial dilakukan untuk mengakui atau menyesuaikan peristiwa yang terjadi secara akrual yang tidak melalui transaksi kas/bank.

**Neraca** merupakan bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan kondisi Aset, Liabilitas dan Ekuitas suatu perusahaan. Menurut Harahap (2009:107), neraca atau daftar disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau *balance sheet* adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau asset, kewajiban-kewajibannya atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu neraca tepatnya dinamakan *statements of financial position*.

**Laba Rugi** Menurut Munawir (2010:26), laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba-rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan service) diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.
2. Bagian kedua menunjukkan beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum/administrasi.

3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan beban-beban yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan.
4. Bagian ke empat menunjukkan laba atau rugi yang insidental (*extra ordinary gain or loss*) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

**Laporan Arus Kas** merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional keuangan. Dengan demikian upaya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang bertumpu pada fungsi anggaran keuangan yaitu dengan menggunakan Cashflow sebagai aliran arus kas. Menurut Sofyan Syafari Harahap, arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan dan investasi. Menurut Donald E. Kieso dkk. dalam bukunya Akuntansi *Intermediate*, Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas dan perubahan bersih pada kas yang berasal pada kas yang berasal pada aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan dari suatu perusahaan selama suatu periode dalam format yang merekonsiliasi saldo kas dan akhir.

**Laporan perubahan modal** adalah suatu laporan mengenai perubahan modal suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini dikeluarkan untuk menjelaskan adanya peningkatan atau penurunan aktiva (aset) bersih dan kekayaan selama periode yang ditentukan perusahaan, misalnya dalam periode bulan atau tahun. Laporan ini akan menyajikan perhitungan fluktuasi modal untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perkembangan modal selama periode akuntansi. Umumnya laporan perubahan modal digunakan oleh pemangku kepentingan baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk merubah, menyesuaikan, atau memperbaiki kinerja perusahaan.

**Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)** adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Menurut (2015) Akbar, Juliastrioza. **ERP** adalah system informasi untuk industri manufaktur walaupun jasa, yang bertindak menyatukan dan mengotomasikan proses bisnis. Software ERP membantu proses bisnis yang praktis dengan menyatukan aktivitas bisnis termasuk pemasaran, produksi, logistik, akuntansi dan sumber daya manusia. **Modul Finance Accounting (FICO)** adalah modul ERP yang sangat penting untuk setiap industri, karena hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengelola arus kas, pembayaran, utang-piutang, dan berbagai transaksi keuangan sehari-hari.

**Pengawasan dan Pengendalian Keuangan** merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap dimana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi.

**Matching Cost** merupakan kegiatan penandingan biaya dengan pendapatan pada periode yang sama. Setelah pendapatan dari periode akuntansi diakui sesuai dengan prinsip pendapatan, prinsip penandingan

diterapkan untuk mengakui beban periode tersebut. Perusahaan dalam melaksanakan operasinya menggunakan sumberdaya, yang digunakan haruslah dialokasikan dalam hal ini sebagai beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Suatu beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut dengan pengaitan biaya dan pendapatan ini melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama, misalnya berbagai komponen biaya yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang.

**Cash Basis** merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain Akuntansi Cash Basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Cash Basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas telah diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan “dasar akrual” hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan, kedua teknik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan, jika menggunakan dasar akrual maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang dagang sebaliknya jika yang di pakai cash basis maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. cash basis juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu :

1. **Pengakuan Pendapatan**, saat pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas.
2. **Pengakuan Biaya**, pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga.

**Cash Balance** menggambarkan posisi cash in dan cash out suatu proyek. Posisi Cash in lebih besar dari cash out maka proyek tersebut masih ada kelebihan dana. Jika posisi Cash out lebih besar dari cash out maka proyek tersebut kekurangan dana.

**Cash in** merupakan aliran kas penerimaan yang diperoleh suatu proyek yang terdiri dari:

1. Uang Muka, merupakan pembayaran dari Pemberi Kerja pada saat proyek akan dimulai dan dimaksudkan sebagai pinjaman dana modal kerja awal pelaksanaan proyek.
2. Termijn, merupakan pembayaran yang diterima dari Pemberi Kerja atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai dan diakui oleh Pemberi Kerja.
3. Eskalasi/Claim adalah pembayaran yang diterima dari Pemberi Kerja atas penyesuaian harga dari kontrak yang diajukan dan disetujui oleh Pemberi Kerja.
4. *Retention Money*, adalah pembayaran yang diterima dari Pemberi Kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan merupakan pengembalian terhadap potongan Jaminan Pemeliharaan yang dilakukan pada setiap pembayaran termijn.
5. *Retention Money*, juga dapat dibayarkan setelah progress tercapai 100% (MC 100%) dengan syarat menyerahkan Bank Garansi sebanding dengan nilai *Retention Money* yang akan dicairkan atau ditentukan oleh pemberi kerja.

6. Penerimaan lain-lain, penerimaan dari jasa tenaga *Joint Operation*, jasa giro, klaim Asuransi, restitusi, dll.

**Cash Out** merupakan aliran dana keluar dari perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, meliputi :

1. Pengeluaran biaya operasional adalah pembayaran untuk kebutuhan operasional pada suatu periode waktu tertentu, misalnya pembayaran kepada Sub Kontraktor, Supplier, Bas Borong dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek.
2. Pengeluaran biaya non operasional atau biaya umum (overhead) adalah pembayaran atas hal-hal yang tidak berpengaruh langsung terhadap produksi pada periode waktu tertentu, misalnya biaya upah / gaji, biaya kesehatan, alat tulis kantor, SPPD, dll.
3. Pengeluaran lainnya kepada pihak ketiga, misalnya biaya provisi bank garansi, biaya bunga bank, biaya premi asuransi, premi jamsostek, dll.
4. Pengeluaran lainnya untuk pembayaran hutang perusahaan, Panjar kerja dan pengeluaran lain untuk keperluan proyek.

**Pajak Penghasilan** merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi dalam suatu masa pajak. Adapun beberapa jenis pajak, diantara lain :

- a. **Pajak Penghasilan Pasal 21** merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan / jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarifnya (Pasal 17)**

Penghasilan Orang Pribadi		Tarif
-	60,000,000	5%
60,000,000	250,000,000	15%
250,000,000	500,000,000	25%
500,000,000	5,000,000,000	30%
> 5,000,000,000		35%

**Lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Status PTKP	PTKP Per Tahun	PTKP Per Bulan	PTKP Per Hari
TK/0	54,000,000	4,500,000	150,000
TK/1	58,500,000	4,875,000	162,500
TK/2	63,000,000	5,250,000	175,000
TK/3	67,500,000	5,625,000	187,500
K/0	58,500,000	4,875,000	162,500
K/1	63,000,000	5,250,000	175,000
K/2	67,500,000	5,625,000	187,500
K/3	72,000,000	6,000,000	200,000

Note :

Status K (Kawin) & TK (Tidak Kawin)

Perhitungan :

- Penghasilan
  - Gaji
  - Tunjangan
  - Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja
- Pengurang
  - Biaya Jabatan 5% dari Penghasilan Bruto (*Maksimal 6.000.000 Per Tahun atau 500.000 Per Bulan*)
  - Iuran Pensiun
  - THT/JHT Yang dibayar Sendiri
- Penghasilan Netto (Setahun/disetahunkan)
- Dikurangi PTKP
- Penghasilan Kena Pajak
- Dikenakan Tarif pasal 17

b. **Pajak Penghasilan Pasal 23** yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, deviden, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah, imbalan sehubungan jasa lain. Tarif yang dikenakan untuk dividen adalah 15%, sedangkan untuk sewa dan jasa lainnya dikenakan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Jika tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari PPh 23.

c. **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)** merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sesuai PP Nomor 9 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tarif sebesar 1,75% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi;
2. Tarif sebesar 4% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi;
3. Tarif sebesar 2,65% dikenakan terhadap pelaksana konstruksi menengah dan besar;
4. Tarif sebesar 2,65% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha;
5. Tarif sebesar 4% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha;
6. Tarif sebesar 3,5% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikasi usaha;
7. Tarif sebesar 6% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha.

**Pajak Pertambahan Nilai atau PPN** adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tarif PPN adalah sebesar 11%

**Restitusi PPN** adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak ke negara. Dasar pengajuan restitusi adalah kelebihan bayar yang dialami oleh wajib pajak. Sedangkan restitusi PPN adalah pengajuan pengembalian pembayaran pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Restitusi PPN hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

### Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Jenis Pajak	Batas Waktu	
	Penyetoran	Pelaporan
PPh 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh 23	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh 4 ayat 2	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPN	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 30/31 bulan berikutnya

**BNI Direct** adalah *electronic cash management* yang dikeluarkan BNI secara khusus untuk segala aktivitas keuangan dari nasabah terkait informasi transaksi yang ada di rekening perusahaan. Fasilitas online dari BNI ini merupakan channel elektronik yang lengkap untuk kebutuhan arus keuangan perusahaan terkait gaji karyawan, BNI Pops hingga bayar pajak.

**Rekrutmen** Menurut Mardianto (2014) Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan Rekrutmen agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain.

**Kontrak kerja** merupakan perjanjian tertulis dan resmi antara perusahaan dengan karyawan yang di dalamnya termuat syarat pekerjaan, hak, serta kewajiban selama kerja sama berlangsung. Penerbitan kontrak kerja ini bersifat wajib sebelum kerja sama atau masa jabatan dimulai. Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Laporan Personalia** adalah bagian yang spesialis mengatur atau mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan termasuk proses penerimaan pegawai. Dalam melakukan kerjanya, bagian personalia dibagi dalam empat bagian, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, penerimaan pegawai, manajemen SDM. Selain mengatur penerimaan pegawai, bagian personalia juga mengatur proses transisi pegawai seperti kenaikan jabatan atau perpindahan bagian. Tak ketinggalan juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi pegawai untuk pengembangan karier mereka.

## METODE

Artikel ini disusun dengan menekankan pada pengalaman langsung penulis sebagai Staf Akuntansi, Keuangan, dan Pajak Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripajra, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP, didukung dengan landasan teori serta Standar Operasional Prosedur mengenai proses bisnis di Proyek, persiapan administrasi keuangan, dan pelaksanaan Proyek pada lingkup Keuangan, Akuntansi, Pajak dan HC.

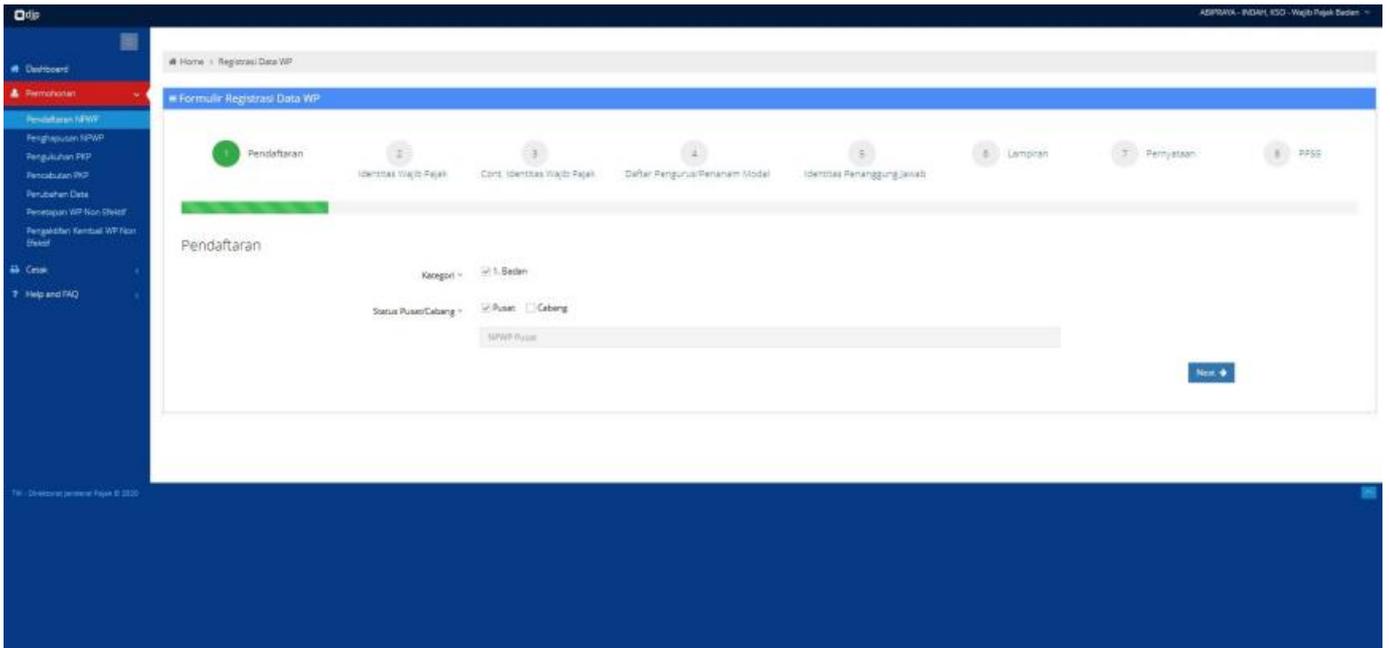
## PEMBAHASAN

Kontrak Kerja Konstruksi merupakan hal pertama yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan Konstruksi atau Pelaksanaan Konstruksi. Berikut ini tata Kelola Kontrak Kerja Konstruksi :

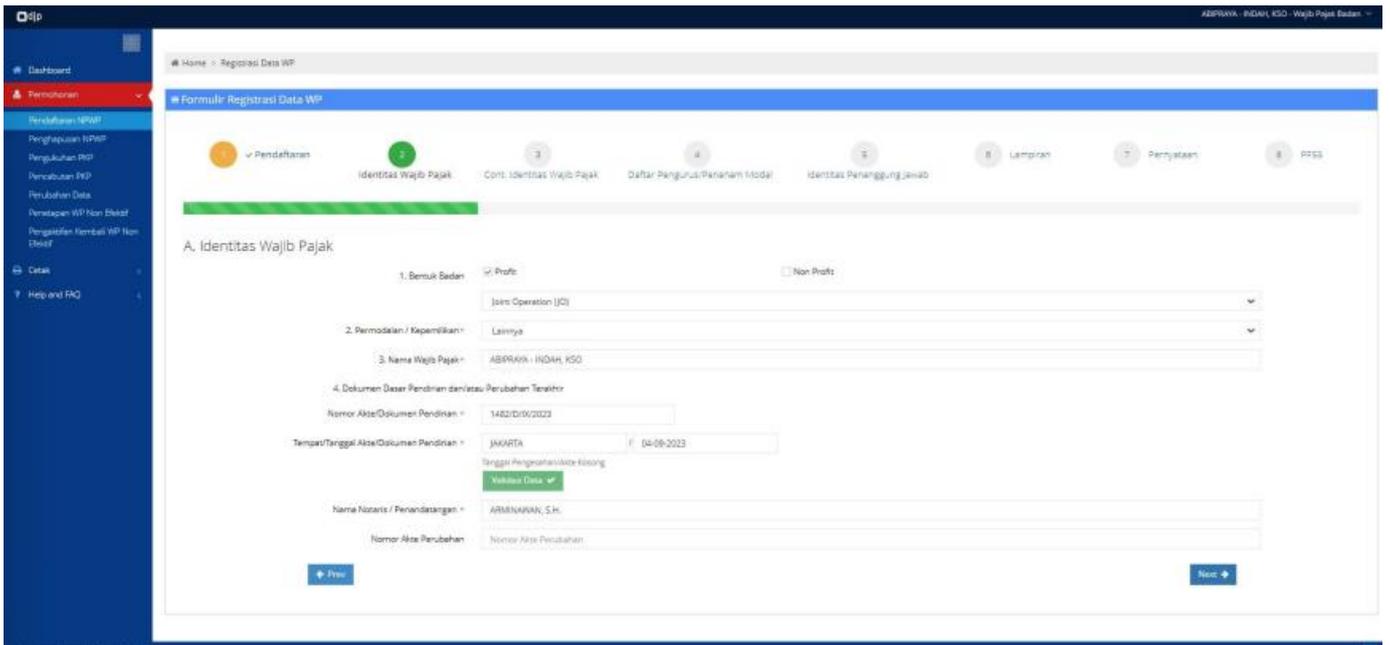
Tender	Pra Kontrak	Masa Pelaksanaan	Masa Pemeliharaan	Masa Kegagalan Bangunan
T1	T2	T3	T4	T5
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Reviu Dokumen Tender meliputi ketentuan pada RKS/ KAK, KP/ER, SSUK, SSKK.</li> <li>2 Menyusun daftar pertanyaan untuk disampaikan pada saat aanwijzing.</li> <li>3 Klarifikasi Harga Satuan Timpang.</li> <li>4 Evaluasi kewajaran harga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Reviu draft kontrak/ rancangan kontrak</li> <li>2 Rapat persiapan penandatanganan kontrak</li> <li>3 Negosiasi draft /rancangan kontrak</li> <li>4 Memastikan kelengkapan seluruh dokumen kontrak, termasuk lampiran-lampirannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melaksanakan dokumentasi aspek kontraktual yang terjadi di lapangan diantaranya perubahan VO/ CCO yang dapat berupa surat, notulen rapat, berita acara, site instruction, persetujuan, izin, catatan/memo, foto, video, gambar, data-data sesuai dengan tahapan pekerjaan.</li> <li>2 Melaksanakan korespondensi dengan Pengguna Jasa.</li> <li>3 Klaim karena peristiwa kompensasi (jika ada): - Pemberitahuan kepada Pengguna Jasa mengenai kejadian yang menyebabkan peristiwa kompensasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surat intention notice to claim, perhitungan &amp; penyampaian dokumen klaim serta negosiasi.</li> <li>2 Memproses addendum dan atau amandemen.</li> <li>3 Memproses Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 1 (BAST 1).</li> <li>4 Menyelesaikan setiap perselisihan (dispute) permasalahan provek/kontrak</li> <li>5 Contract change management</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jika terjadi kegagalan bangunan menyelesaikan menindaklanjuti rekomendasi kegagalan bangunan oleh Penilai Ahli sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

Pada Tahapan Pra Kontrak Bagian Keuangan Proyek dibantu dengan tim Legal Divisi PT. Brantas Abipraya (Persero) membuat Kesepakatan bersama member PT. Indah Karya (Persero) mengenai pembentukan Kerja sama Operasi dalam hal ini menjadi Abipraya-Indah, KSO. Setelah terbentuknya Abipraya-Indah, KSO Bagian Keuangan Proyek melengkapi administrasi Perpajakan, yaitu NPWP. Berikut ini merupakan tata cara pembuatan NPWP Badan :

1. Mengisi formular registrasi data WP, memilih kriteria pendaftaran



## 2. Mengisi Identitas Wajib Pajak



### 3. Mengisi Daftar Pengurus/Penanam Modal

Nama WP	NPWP	NIK / Paspor	Kedudukan	Status	Aksi
A*****A B*****O	69.955.029.9-622.000	3*****1	Pengurus	Utama	Hapus
P*, B*****S A*****A (*****)	01.060.003.9-093.000	-	Anggota KSO/JO	Lainnya	Hapus
P*, P*****N P*****N (***** PT I***H K****A	01.000.012.3-093.000	-	Anggota KSO/JO	Lainnya	Hapus

#### 4. Mengisi Identitas Penanggung Jawab

**Formulir Registrasi Data WP**

Progress: 1. Pendaftaran, 2. Identitas Wajib Pajak, 3. Cont. Identitas Wajib Pajak, 4. Daftar Pengurus/Penanam Modal, 5. Identitas Penanggung Jawab, 6. Lampiran, 7. Pernyataan, 8. PPS5

### D. Identitas Penanggung Jawab

9. Identitas Pimpinan / Penanggung Jawab

Kebangsaan \*

NPWP

Nama \*

Jabatan \*

NIK / No. Paspor \*

Alamat Domisili

Jalan \*

Blok  Nomor

RT / RW  /

#### 5. Melengkapi Lampiran

**Formulir Registrasi Data WP**

Progress: 1. Pendaftaran, 2. Identitas Wajib Pajak, 3. Cont. Identitas Wajib Pajak, 4. Daftar Pengurus/Penanam Modal, 5. Identitas Penanggung Jawab, 6. Lampiran, 7. Pernyataan, 8. PPS5

### F. Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah :

Benar

Lengkap

## 6. Mengisi pernyataan, selesai.

The image displays two screenshots of the DJP (Direktori Jenderal Pajak) online registration system. The top screenshot shows the 'Formulir Registrasi Data WP' page. The progress bar indicates that steps 1 through 7 are completed, and step 8, 'PP55', is the current step. The 'Pemberitahuan Mengikuti Tarif Umum/PP55' section contains the following text:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, BUMDes/BUMDesma, dan Koperasi, yang memenuhi kriteria tertentu, berhak untuk dikenakan Pajak Penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, Saya memilih untuk:

Dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebesar 0,5%

Dikenai Pajak Penghasilan sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa saya telah mengerti dan memahami konsekuensi atas pilihan saya.

Buttons: [← Prev](#) and [Simpan](#)

The bottom screenshot shows the same page with a confirmation dialog box overlaid:

Konfirmasi

Apakah Anda Yakin Simpan Rekam Formulir ?

Buttons: [Ya](#) and [Tidak](#)

Kemudian akan diemail oleh [eregistration@pajak.go.id](mailto:eregistration@pajak.go.id)



Setelah membuat NPWP, bagian Keuangan Proyek menyiapkan kelengkapan data untuk mendaftarkan Kerja Sama Operasi Abipraya-Indah sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Adapun dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, sebagai berikut :

1. Formulir Pengukuhan PKP
2. Formulir Aktivasi Akun PKP
3. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik
4. NPWP KSO
5. NIB Perusahaan
6. NPWP PT Brantas Abipraya (Persero) dan NPWP PT Indah Karya (Persero)
7. NPWP dan KTP Kuasa KSO dan Pengurus KSO
8. Bukti Setor PPh PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Indah Karya (Persero)
9. Akta KSO dan Surat Kerja Sama Operasi

Bagian Keuangan Proyek memberikan dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.1, RT.1/RW.4, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150. Kemudian Bagian Keuangan menunggu konfirmasi dari KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Setelah menunggu Konfirmasi, KPP Pratama Jakarta Jatinegara mengukuhkan Abipraya-Indah, KSO melalui penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor : S-440/PKP/KPP.200203/2023. Bersamaan dengan terbitnya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Abipraya-Indah,KSO bagian Keuangan Proyek mendapatkan sertifikat e-faktur untuk keperluan Setor, Laporan PPn serta Restitusi PPn.

Keuangan Proyek kemudian membuat Rekening KSO dengan nama rekening Abipraya-Indah,KSO. Rekening tersebut untuk keperluan komponen Kontrak Kerja Konstruksi sehingga pada saat penerimaan uang muka dan termijn dapat dikirim ke Rekening KSO. Kemudian Keuangan Proyek membuat Rekening Operasional dan Rekening Escrow untuk keperluan operasional dan Pembayaran melalui SCF. Berikut ini adalah dokumen-dokumen dalam membuat rekening operasional :

1. Akta Pendirian KSO dan Surat Kerja Sama Operasi
2. NPWP Abipraya-Indah, KSO
3. NPWP Kuasa KSO
4. KTP Kuasa KSO
5. Surat Permohonan Pembukaan Rekening dengan mengisi formulir yang diberikan oleh Bank terkait
6. Spesimen Penandatanganan Pejabat Proyek

## 7. Surat Permohonan Penerbitan Buku Cek

## 8. Surat Kuasa Pejabat Proyek

Keuangan Proyek kemudian membuat Jaminan Pelaksanaan untuk keperluan Kontrak Kerja Konstruksi. Berikut ini alur pembuatan Jaminan Pelaksanaan dan Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan Jaminan Pelaksanaan.

Bagan Alir	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
	1) Mengajukan Permohonan Penerbitan Jaminan Pelaksanaan ke Divisi	PM & SAM	Dokumen : Akta Pendirian KSO, Surat Kesepakatan Kerja Sama Operasi, NPWP, Surat Permohonan Penerbitan Jaminan, Rekening KSO.
	2) Mengajukan Penerbitan Jaminan Pelaksanaan ke Departemen Keuangan	SVP Divisi, VP Keuangan Divisi, VP Legal Divisi.	
	3) Departemen Keuangan melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen, jika dokumen lengkap VP Treasury dan SVP Departemen Keuangan akan menyetujui	SVP Departemen Keuangan, SVP Legal, VP Treasury, dan VP Legal	
	4) Direktur Keuangan dan Direktur Operasi Meriview dan menyetujui Permohonan tersebut	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktur Operasi	
	5) Kemudian Departemen Keuangan Menghubungi Bank atau Asuransi untuk pembuatan		
	6) Jaminan Pelaksanaan Terbit		

Berikut gambaran Jaminan Pelaksanaan yang telah diterbitkan oleh Bank

NO. 008-A 413504

  
**mandiri**

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
No. BG16623233797 Tanggal 21 September 2023  
*Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo*  
Jakarta, 13 Desember 2024

<p><i>Beneficiary</i> PPK Pengembangan Kawasan Permukiman I Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Tengkawang no.1, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda (75125)</p>	<p><i>Applicant</i> Abipraya - Indah, KSO Jl. DL Panjaitan Kav. 14 Cipinang Cempedak Jutinegara Jakarta Timur</p>
---	---

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender, dari tanggal 21 September 2023 s.d 13 Desember 2024.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin tidak/jalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk memintat supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

\*\*\* Rp. 44.805.362.850,00 \*\*\*

Jakarta, 21 September 2023  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Cabang Jakarta D.I. Panjaitan

 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
CABANG KARTADI PANJAITAN  
METRAL  
TEMPEL  
041AKX508380052

**Nahdiyah Hidayati**  
Branch Manager



NO. 008-A 413504

  
**mandiri**

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
No. BG16623233797 Tanggal 21 September 2023  
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo  
Jakarta, 13 Desember 2024

*Beneficiary*  
PPK Pengembangan Kawasan Permukiman I Satuan Kerja  
Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi  
Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Jalan Tengkawang no.1, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai  
Kunjang, Samarinda (75125)

*Applicaw*  
Abipraya - Indah, KSO  
Jl. DL Panjaitan Kav. 14 Cipinang  
Cempedak Jatinegara Jakarta Timur

Yang bertanda tangan di bawah ini Nahdiyah Hidayati dalam jabatan selaku Branch Manager dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Jakarta D.I. Panjaitan berkedudukan di Gedung WIKA Tower 2 Jalan D.I Panjaitan Kav.10 Jakarta Timur 13340.

Untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : PPK Pengembangan Kawasan Permukiman I  
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kalimantan  
Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Alamat : Jalan Tengkawang no.1, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang,  
Samarinda (75125)

Selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. 44.805.362.850,00 (Terbilang: empat puluh empat milyar delapan ratus lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan atas Paket Pekerjaan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : PB.02.01/Ch24.6.4/261 Tanggal 18 September 2023, apabila:

Nama : Abipraya - Indah, KSO  
Alamat : Jl. DL Panjaitan Kav. 14 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur

Selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Termyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.  
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.



Setelah terbit Jaminan Pelaksanaan, *Project Manager* dan *Site Administration Manager* menghadiri acara penandatanganan kontrak kerja konstruksi bersama *Senior Vice President* Divisi. Berikut ini merupakan ringkasan dari kontrak kerja konstruksi proyek Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP.

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-033.05.1.633051/2023 6 September 2023
2. Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan / Mak : 4971.RBB.801.101.PD.534131
3. Nomor dan tanggal SPK / Kontrak : HK.02.01/Cb.24.6.4/264  
Tanggal 21 September 2023
- Nomor dan tanggal SPMK / Kontrak : HK.01.02/Cb24.6.4/264.1  
Tanggal 21 September 2023
4. Nama Kontraktor/ Perusahaan : ABIPRAYA - INDAH, KSO
5. Alamat Kontraktor : Jl. D.I. Panjaitan Kav.14 Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta
6. Nilai SPK/ Kontrak : Rp 896.107.257.000,00
7. Nilai Pekerjaan UM : Rp 134.416.088.550,00 (Uang Muka 15%)
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP
9. Pembayaran : Pembayaran Uang Muka (15%) dari Nilai Kontrak Kepada rekening pihak kedua an Abipraya-Indah,KSO No. rekening : 1660004655346 Bank Mandiri
10. Jangka waktu pelaksanaan : 450 ( Empat ratus lima puluh ) Hari Kalender
11. Tanggal penyelesaian pekerjaan : Mulai tgl. 21 September 2023 dan berakhir tgl. 13 Desember 2024
12. Jangka waktu pemeliharaan : 730 ( Tujuh ratus tiga puluh ) Hari Kalender
13. Ketentuan Sanksi : Keterlambatan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Kesepakatan kontrak kerja telah dicapai kemudian keuangan proyek beserta dengan tim teknik membuat tagihan kepada owner terkait Uang Muka sebesar 15% dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. 134.416.088.550,00. Selanjutnya keuangan proyek membuat jaminan uang muka sebagai salah satu syarat mengajukan tagihan uang muka. Adapun syarat-syarat dokumen uang muka yang perlu disiapkan Tim keuangan proyek :

1. Bank Garansi Jaminan Uang Muka
2. Kwitansi Pembayaran
3. Berita Acara Pembayaran Uang Muka
4. Rencana Penggunaan Uang Muka
5. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka
6. Faktur Pajak Keluaran

Dokumen-dokumen tersebut akan direview owner. Setelah direview akan terbit SP2D dan surat perintah bayar oleh owner yang kemudian uangnya akan dikirim ke Rekening Abipraya-Indah, KSO.

Pelaksanaan konstruksi saat ini sudah berjalan 2 bulan Oktober dan November 2023. Penulis membuat artikel ini dengan progress konstruksi sampai dengan tanggal 22 November 2023. Bagian Keuangan, Akuntansi, Pajak, SDM dan Umum membuat form-form kerja yang akan digunakan pada saat pelaksanaan Konstruksi.

Sebelum memulai Pelaksanaan Konstruksi Bagian Keuangan, Akuntansi, Pajak, SDM dan Umum Serta Bagian Operasi dan Teknik membuat Rencana Biaya Pelaksanaan. Berikut ini RBP yang dibuat oleh tim Proyek.

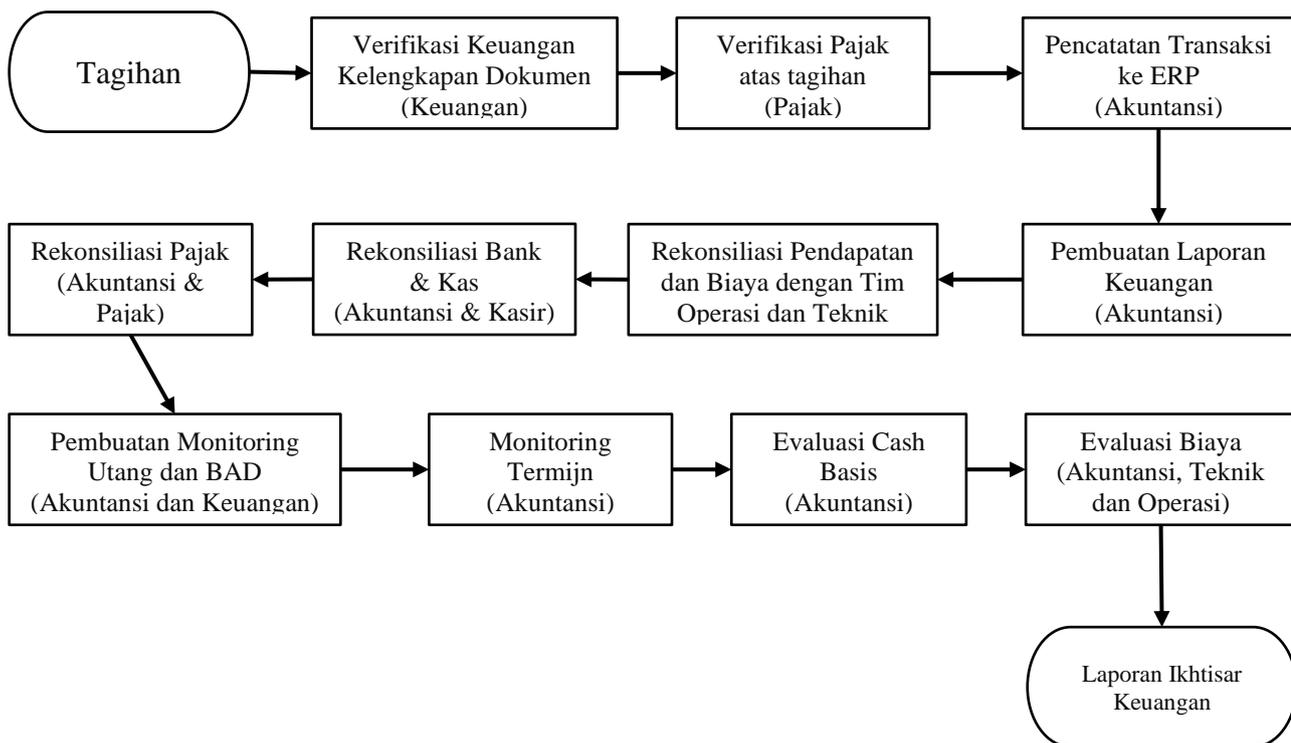
DATA PROYEK					
1	Proyek	:	Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP	9	Wkt Pelaksanaan : 450 hari kalender
				10	Wkt Pemeliharaan : 730 hari kalender
2	No. Kontrak	:		11	Sumber Dana :
3	Tgl Kontrak	:		11.1	APBN : 2023 - 2024
4	Pemberi Kerja	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.2	APBD :
5	Nilai Kontrak	:	807.303.835.854,75 (Excl PPN)	11.3	Loan *) :
5.1	Foreign Currency	:		11.4	Swasta / BUMN lain :
5.2	Local Currency	:	Rp807.303.835.855 (Excl PPN)	12	Sistem Pembayaran : Termin
6	NO Kontrak Addendu	:		12.1	Uang Muka : 15%
6.1	Tgl Kontrak	:			
6.2	Foreign Currency	:		12.2	Periode Tagihan : Milestone
6.3	Local Currency	:	Rupiah	12.3	Retensi : 5 % dari Fisik
7	Eskalasi	:			
8	Kurs Awal	:			
RENCANA BIAYA PROYEK					
NO	URAIAN	RENCANA BIAYA PROYEK			
		NILAI (Rp)	Persentase (%)		
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>807.303,84</b>	<b>100,00</b>		
1	Fisik	807.303,84	100,00		
2	Eskalasi				
3	Klaim & Lain-lain				
<b>II</b>	<b>BIAYA</b>	<b>720.518,67</b>	<b>89,25</b>		
1	Biaya Langsung	695.592,54	86,16		
	1.1 Upah	49.551,23	6,14		
	1.2 Material	158.084,35	19,58		
	1.3 Alat	28.654,02	3,55		
	1.4 Subkontraktor	459.302,94	56,89		
2	Persiapan dan Penyelesaian	12.816,58	1,59		
3	Biaya Tak Langsung	12.109,56	1,50		
4	Pembebanan dan Investasi				
<b>III</b>	<b>LABA PROYEK ( I - II )</b>	<b>86.785,16</b>	<b>10,75</b>		
<b>IV</b>	<b>PENDAPATAN &amp; BIAYA LAINNYA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1	Pendapatan				
2	Biaya Lain-Lain				
<b>V</b>	<b>LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK ( III - IV )</b>	<b>86.785,16</b>	<b>10,75</b>		
<b>VI</b>	<b>BIAYA BANK &amp; PPh Final Jasa Konstruksi</b>	<b>22.200,86</b>	<b>2,75</b>		
1	Bunga Bank	807,30	0,10		
2	PPh Final	21.393,55	2,65		
<b>VII</b>	<b>LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi ( V - VI )</b>	<b>64.584,31</b>	<b>8,00</b>		

Bagian SDM kemudian menganalisa kebutuhan Karyawan dan membuat struktur organisasi serta membuat jobdest tiap-tiap jabatan. Kemudian bagian SDM melakukan Rekrutmen Karyawan. Adapun tahapan yang digunakan dalam rekrutmen Proyek Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP.



Proses Rekrutmen Karyawan diawali dengan seleksi Administrasi kemudian dilanjutkan interview user (Manager masing-masing tim kerja), jika manager tim kerja cocok dengan peserta rekrutmen maka akan dilanjutkan dengan Kontrak Kerja bersama bagian SDM. Kemudian Bagian SDM akan merekap data Pegawai untuk kemudian menyiapkan fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh pegawai. Bagian Umum berkoordinasi dengan bagian SDM untuk mencari mess dan catering pegawai yang merupakan fasilitas yang akan didapat oleh karyawan. Bagian Keuangan menyiapkan Dokumen Kerja Sama dengan RSUD Sepaku yang merupakan kewajiban Proyek untuk menanggung biaya kesehatan pegawai. Bagian SDM dan Umum membuat aturan jam kerja, seragam, jadwal cuti pegawai dan monitoring kendaraan Proyek.

**Siklus Pelaksanaan Keuangan, Akuntansi, dan Pajak**



Keuangan memeriksa kelengkapan tagihan. Berikut ini yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan Dokumen Tagihan :

1. Surat Perintah Kerja
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
4. Berita Acara Pembayaran

5. Invoice
6. Permohonan Pembayaran
7. Faktur Pajak
8. Kwitansi

Keuangan kemudian membuat dokumen pendukung, antara lain :

1. Checklist Dokumen
2. Checklist Penandatanganan Dokumen
3. Perhitungan Tagihan
4. Monitoring Tagihan dan Utang Usaha
5. Surat Permohonan Pembayaran Invoice ke Divisi
6. Membuat Voucher Merah dan Biru

Bagian Keuangan membuat Rencana Kebutuhan Dana Kerja (RKDK) dan mengajukan ke Divisi Operasi, untuk digunakan keperluan Operasional sekaligus list pembayaran rekanan/vendor melalui *Supply Chain Financing* (SCF). Keuangan membuat monitoring tagihan dan utang usaha.

Bagian Pajak memverifikasi Tagihan mengenai aspek pajak atas tagihan tersebut. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**Pajak Penghasilan Pasal 23**, Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, dividen, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah, imbalan sehubungan jasa lain. Tarif yang dikenakan untuk dividen adalah 15%, sedangkan untuk sewa dan jasa lainnya dikenakan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Jika tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari PPh 23.

**Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)** merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sesuai PP Nomor 9 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tarif sebesar 1,75% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi;
2. Tarif sebesar 4% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi;
3. Tarif sebesar 2,65% dikenakan terhadap pelaksana konstruksi menengah dan besar;
4. Tarif sebesar 2,65% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha;
5. Tarif sebesar 4% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha;
6. Tarif sebesar 3,5% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikasi usaha;
7. Tarif sebesar 6% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha.

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tarif PPN adalah sebesar 11%.

Bagian Pajak kemudian merekap seluruh transaksi yang masuk kriteria dan wajib dipotong pph. Bagian pajak kemudian membuat ID Billing untuk melakukan pembayaran Pajak setiap transaksi yang ada. Kemudian melaporkannya di DJP Online. Berikut tabel kegiatan perpajakan yang ada di Proyek Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP.

Jenis Pajak	Batas Waktu	
	Penyetoran	Pelaporan
PPh 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh 23	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh 4 ayat 2	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPN	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 30/31 bulan berikutnya

Bagian Akuntansi akan mencatat semua transaksi yang ada di Proyek menggunakan aplikasi ERP Odoo. Kemudian bagian akuntansi menyusun Laporan Ikhtisar Keuangan, berikut tahapan-tahapan penyusunan Laporan Ikhtisar Keuangan :

1. Pencatatan Jurnal transaksi ke ERP, yang nantinya akan terbentuk Buku Besar setiap jurnalnya.

**TRANS/2023/18643**

Transaction Type: Proyek  
 Payment Type: Internal Transfer  
 Type RK: Non RK  
 Partner: [Empty]  
 Journal: [BNK0002] Bank BNI - KSO0198 - 1795009363 (IDR)  
 Advis: [Empty]  
 Transfer To: [KKR0001] Kas Kecil Rupiah - KSO0198 (IDR)  
 Payment Method: Manual  
 NTPN: [Empty]  
 Tanggal Setor NTPN: [Empty]  
 Journal Entry Name: N1198/2023/0006SSKK198/2023/0003

Amount: Rp 50,000,000.00 IDR  
 Date: 28/10/2023  
 Bank Reference: [Empty]  
 Cheque Reference: [Empty]  
 Memo: KAS-DKT11  
 Analytic: [KSO0198] Divisi Operasi 1 / Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripiraja dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP  
 Bisnis Unit: Divisi Operasi 1 / Proyek 1

Account	Buku Bantu...	Ref RK	Partner	Branch	Label	Analytic Account	Currency	Debit	Credit	Tax Grids
1010104010	Ayat ...			Divisi Operasi 1/ P...	TRANS/2023/186...	[KSO0198] Divisi ...		Rp 0.00	Rp 50,000,000.00	
1010101110	KK ...			Divisi Operasi 1/ P...	Transfer from [BNK0002] Bank BNI - KSO0198 - 1795009363	[KSO0198] Divisi ...		Rp 50,000,000.00	Rp 0.00	

2. Terbentuk *Trial Balance*, Kumpulan akun-akun dalam laporan pembukuan atau akuntansi yang berisi saldo yang terdapat pada buku besar.

Accounting Overview Customers Vendors Accounting Transfer Reporting Faktur Pajak

Trial Balance

From: Oct 1, 2023 to: Oct 31, 2023

There are unposted Journal Entries prior or included in this period

	Initial Balance		Oct 2023		Total		Lab Rugi		Neraca	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1010101110 - KK - KSO0198 Kas Kecil Rup...			Rp 200,000,000.00	Rp 167,064,857.00	Rp 32,935,143.00					Rp 32,935,143.00
1010102010 - BNK0001 - KSO0198 PT Bank M...			Rp 117,940,162,591.00	Rp 102,224,669,355.00	Rp 16,895,040,635.80					Rp 16,895,040,635.80
1010102010 - BNK0002 - KSO0198 PT Bank N...			Rp 2,389,622,276.00	Rp 2,020,836,059.00	Rp 368,786,217.00					Rp 368,786,217.00
1010104010 - Ayat Silang *			Rp 3,711,811,218.00	Rp 3,711,811,218.00						
1010701010 Tagihan Bruto kepada Pemberi ...			Rp 8,097,257,466.40	Rp 8,097,257,466.40						Rp 8,097,257,466.40
1010803100 Piutang Non Usaha Pihak Beel...	Rp 14,001,676.00					Rp 14,001,676.00				Rp 14,001,676.00
1011101010 Perediaan Bahan Konstruksi *			Rp 673,358,795.00	Rp 673,358,795.00						
1011610100 PPH Masukan Dalam Hegep *			Rp 52,827,500.00			Rp 52,827,500.00				Rp 52,827,500.00
1011642010 Piutang PPh Pasal 4 ayat 2 *			Rp 3,209,032,745.00			Rp 3,209,032,745.00				Rp 3,209,032,745.00
1012101010 BDD - Kontrak Konstruksi *			Rp 420,070,277.00			Rp 420,070,277.00				Rp 420,070,277.00
1012104010 BDD - Umum dan Administrasi *			Rp 709,768.00	Rp 709,768.00						
2010102010 Utang Usaha Pada Pihak Ketiga...			Rp 62,720,000.00	Rp 126,719,795.00		Rp 63,999,795.00				Rp 63,999,795.00
2010102030 Utang Usaha Pada Pihak Ketiga...			Rp 1,082,714,886.00	Rp 1,082,714,886.00						
2010102070 Utang Usaha Pada Pihak Ketiga...			Rp 2,500,000.00			Rp 2,500,000.00				
2010301011 Beban Akan Dibayar - Material *			Rp 126,719,795.00	Rp 726,186,205.00		Rp 599,466,500.00				Rp 599,466,500.00
2010303011 Beban Akan Dibayar - Alat *			Rp 2,250,000.00	Rp 2,250,000.00		Rp 19,750,000.00				Rp 19,750,000.00
2010304011 Beban Akan Dibayar - Subkontr...			Rp 1,127,828,005.00	Rp 5,555,418,981.04		Rp 4,427,590,976.04				Rp 4,427,590,976.04
2011120100 Utang PPh Pasal 21 *			Rp 649,344,081.00	Rp 649,344,081.00						
2011123010 Utang PPh Pasal 23 *				Rp 5,653,524.00		Rp 5,653,524.00				Rp 5,653,524.00
2011142010 Utang PPh Pasal 4 ayat 2 *				Rp 1,661,224.00		Rp 1,661,224.00				Rp 1,661,224.00
2011150010 Utang PPh Final - Konstruksi *				Rp 79,335,340.00		Rp 79,335,340.00				Rp 79,335,340.00
20112502010 Utang Muka Pemberi Kerja Jk P...				Rp 214,577,322.86		Rp 214,577,322.86				Rp 214,577,322.86
2011498020 Utang Lain-Lain - Kepala Emi...				Rp 121,095,575,270.00		Rp 121,095,575,270.00				Rp 121,095,575,270.00
2014198040 Utang Lain-Lain - Kepala Emi...				Rp 420,070,277.00		Rp 420,070,277.00				Rp 420,070,277.00
4010102015 Pihak Berekas - Di luar Grup ...	Rp 1,184,135,747.00		Rp 99,827,501,384.00	Rp 132,303,919.49	Rp 98,511,062,017.51					Rp 98,511,062,017.51
5010701010 Material Konstruksi *				Rp 8,097,257,466.40		Rp 8,097,257,466.40				Rp 8,097,257,466.40
5011502010 Beban Pemakaian Peralatan (Se...			Rp 673,358,795.00	Rp 673,358,795.00		Rp 673,358,795.00				Rp 673,358,795.00
5012102010 Beban Subkontraktor - Pihak K...			Rp 2,250,000.00	Rp 2,250,000.00		Rp 2,250,000.00				Rp 2,250,000.00
5012201010 Beban Persiapan Proyek Konstr...			Rp 5,555,418,981.04	Rp 5,555,418,981.04		Rp 5,555,418,981.04				Rp 5,555,418,981.04
501301010 Penghasilan Pegawai Tetap *			Rp 342,222,221.00	Rp 342,222,221.00		Rp 342,222,221.00				Rp 342,222,221.00
501301020 Penghasilan Pegawai PKWT *			Rp 80,261,800.00	Rp 80,261,800.00		Rp 80,261,800.00				Rp 80,261,800.00
5018301050 Badan Penyelenggara Jaminan S...			Rp 208,551,617.00	Rp 208,551,617.00		Rp 208,551,617.00				Rp 208,551,617.00
5018301080 Pensunatan *			Rp 12,440,625.00	Rp 12,440,625.00		Rp 12,440,625.00				Rp 12,440,625.00
5018301090 Pesangon *			Rp 8,194,999.17	Rp 8,194,999.17		Rp 8,194,999.17				Rp 8,194,999.17
			Rp 6,688,483.32	Rp 6,688,483.32		Rp 6,688,483.32				Rp 6,688,483.32

Accounting Overview Customers Vendors Accounting Transfer Reporting Faktur Pajak Raden Achmad Fajri Szeizman

Profit and Loss

Print Preview Export (XLSX) Save

From: Oct 1, 2023 Comparison: Journals: Bank Analytic Branch Options: Posted Entries Only Accrual Basis to: Oct 31, 2023

There are unposted Journal Entries prior or included in this period

PENDAPATAN USAHA	Oct 2023	Rp 8,097,257,466.40
PENDAPATAN USAHA - PIHAK BERELASI		Rp 8,097,257,466.40
> Jasa Konstruksi		Rp 8,097,257,466.40
PENDAPATAN USAHA - PIHAK KETIGA		Rp 0.00
BEBAN POKOK PENDAPATAN		Rp 7,222,473,363.53
> Beban Bahan / Material		Rp 673,358,795.00
> Beban Peralatan		Rp 22,250,000.00
> Beban Subkontraktor		Rp 5,555,418,981.04
> Beban Persiapan dan Penyelesaian		Rp 342,222,221.00
> Beban Tidak Langsung/Umum Proyek/SPC/Plant		Rp 629,223,366.49
> Beban Imbalan Kerja BAU Proyek		Rp 316,137,524.49
> Beban Umum dan Administrasi Proyek		Rp 248,776,548.00
> Beban Kendaraan Proyek		Rp 50,564,312.00
> Beban Administrasi Bank & Keuangan Proyek		Rp 13,744,982.00
> Beban Tidak Langsung Divisi/Unit Bisnis		Rp 0.00
LABA (RUGI) KOTOR		Rp 874,784,102.87
BAGIAN LABA (RUGI) VENTURA BERSAMA		Rp 0.00
> Bagian Laba (Rugi) Ventura Bersama		Rp 0.00
LABA (RUGI) KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA		Rp 874,784,102.87
BEBAN USAHA		Rp 50,592,700.00
> Beban Umum dan Administrasi		Rp 50,592,700.00
LABA (RUGI) SEBELUM PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		Rp 824,191,402.87
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		Rp 63,106,010.00
> Pendapatan Lain-Lain		Rp 63,106,010.00
> Beban Lain-Lain		Rp 0.00
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN KEUANGAN DAN PAJAK		Rp 887,297,412.87
BEBAN KEUANGAN		Rp 0.00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		Rp 887,297,412.87
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN		Rp 214,577,322.86
> Pajak Penghasilan Final		Rp 214,577,322.86
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		Rp 672,720,090.01
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		Rp 0.00
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		Rp 672,720,090.01

Berdasarkan gambar diatas Proyek Sumbu kebangsaan Tahap II mendapatkan progress dibulan Oktober 2023 sebesar 8,09 Miliar Rupiah dengan Biaya 7,42 Miliar Rupiah sehingga Proyek ini membukukan laba sebesar 673 Juta Rupiah.

## 4. Akuntansi membuat Cash Balance, arus kas masuk dan keluar

EVALUASI CASH BALANCE  
PERIODE S/D Oktober 2023

NO	URAIAN	RBP	TH 2023		SD TAHUN 2023
			September	Oktober	
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>807.303.835.855</b>	-	<b>8.097.257.466</b>	<b>8.097.257.466</b>
	PHISIK	807.303.835.854,75	-	8.097.257.466	8.097.257.466
	<b>BIAYA</b>	<b>720.518.673.500</b>	<b>134.640</b>	<b>7.273.066.064</b>	<b>7.273.200.703</b>
	Biaya langsung	695.592.539.650,55	-	6.593.249.997	6.593.249.997
	Biaya Tak Langsung	24.926.133.849,82	134.639,70	679.816.066	679.950.706
	<b>LABA / RUGI</b>	<b>86.785.162.354</b>	<b>(134.640)</b>	<b>824.191.403</b>	<b>824.056.763</b>
	PDP & BEBAN LAINNYA		548.198,50	63.106.010	63.654.209
	<b>LABA RUGI SEBELUM BUNGA &amp; PAJAK</b>	<b>86.785.162.354</b>	<b>413.559</b>	<b>887.297.413</b>	<b>887.710.972</b>
	Beban Bunga KMK	807.303.835,85			
	<b>LABA RUGI SEBELUM PAJAK</b>	<b>85.977.858.518,53</b>	<b>413.559</b>	<b>887.297.412,87</b>	<b>887.710.971,67</b>
	BEBAN PAJAK	21.393.551.650		214.577.323	214.577.323
	<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	<b>64.584.306.868</b>	<b>413.559</b>	<b>672.720.090</b>	<b>673.133.649</b>
				8,31%	8,31%
<b>II</b>	<b>PENERIMAAN</b>	<b>807.303.835.855</b>		<b>117.891.339.869</b>	<b>117.891.339.869</b>
	1. Uang Muka			117.886.542.525	117.886.542.525
	2. Termijn	807.303.835.855		-	-
	3. RM			-	-
	4. Esk			-	-
	5. Restitusi PPN			-	-
	6. Jasa Tenaga			-	-
	7. Realokasi			4.797.344	4.797.344
	8. Pung. PPh 23 & Final			-	-
	<b>PENGELUARAN</b>	<b>742.719.528.986</b>	<b>1.184.135.747</b>	<b>18.616.212.381</b>	<b>19.800.348.128</b>
	Alokasi	<b>695.592.539.651</b>	<b>1.184.135.747</b>	<b>18.483.908.762</b>	<b>19.668.044.509</b>
	- Untuk Modal		<b>1.184.135.747</b>		1.184.135.747
	- Untuk Provisi Jaminan			420.070.277,00	420.070.277
	- Untuk Operasional	695.592.539.650,55			-
	- Ex Termijn & UM			18.063.838.485	18.063.838.485
	Realokasi			-	-
	<b>Pembebanan</b>	<b>47.126.989.336</b>	-	<b>132.303.619</b>	<b>132.303.619</b>
	- Untuk Biaya Umum	24.926.133.850		132.303.619	132.303.619
	- PPh			-	-
	- SCF			-	-
	Bunga KMK	807.303.836		-	-
	Setoran PPN			-	-
	Set. PPh 23	21.393.551.650			-
<b>III</b>	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>64.584.306.868</b>	<b>(1.184.135.747)</b>	<b>99.275.127.488</b>	<b>98.090.991.741</b>
	<b>LABA USAHA</b>	<b>64.584.306.868</b>	<b>413.559</b>	<b>672.720.090</b>	<b>673.133.649</b>
	<b>HAK &amp; KEWAJIBAN</b>	-	<b>(1.184.549.306)</b>	<b>98.602.407.397</b>	<b>97.417.858.092</b>
				<b>8,31%</b>	<b>8,31%</b>

Berdasarkan gambar diatas, Proyek Sumbu Kebangsaan Tahap II membukukan penerimaan sebesar 117 Miliar Rupiah dari Uang Muka dengan Pengeluaran Untuk Modal sebesar 1,1 Miliar Rupiah, Pembebanan Divisi sebesar 132 Juta Rupiah dan Provisi Jaminan Sebesar 420 Juta Rupiah serta Alokasi Ex Termijn yang dipegang Proyek Sumbu Kebangsaan Tahap II sebesar 18,06 Miliar Rupiah. Proyek Sumbu Kebangsaan Tahap II mengalami Surplus sebesar 98,09 Miliar Rupiah.

5. Bagian Akuntansi membuat monitoring utang, BAD dan Termijn

No.	Nama Rekanan	enis Rekanan	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak	Progress			Tagihan		Realisasi
					Oktober	PPn	Total	Oktober	Total	Total BAD
<b>A</b>	<b>MATERIAL</b>			1.102.333,1	673.558,1	62.827,1	726.186,1			599.466,1
1	PT EDP Media Mulimitra Primanusa	Supplier	Pengadaan BIM	36.000.000	36.000.000	3.960.000	39.960.000	39.960.000	39.960.000	-
2	PT Mitra Sumber Energy Perkasa	Supplier	Pengadaan Solar Industri Tahap I	81.250.000	81.250.000	8.937.500	90.187.500	-	-	90.187.500
3	PT Ganendra Ansyila Semesta	Supplier	Pengadaan Material dan Alat Bantu Kerja	73.571.500	73.571.500	-	73.571.500	-	-	73.571.500
4	PT Ganendra Ansyila Semesta	Supplier	Pengadaan Material Hollow dan Pasir	32.777.500	32.777.500	-	32.777.500	-	-	32.777.500
5	Florensis Indah F	Supplier	Pengadaan APD	63.999.795	63.999.795	-	63.999.795	63.999.795	63.999.795	-
6	CV Azarindo Nusantara Aditya Tripta	Supplier	Pengadaan Modulir Direksi Keet	726.000.000	363.000.000	39.930.000	402.930.000	-	-	402.930.000
7	PT Daniswara Jaya Perkasa	Supplier	Pengadaan Alat Bantu Kerja	35.981.000	-	-	-	-	-	-
8	Syarifudin Wijaya	Supplier	Pengadaan Mebel Kantor Plaza Legislatif dan Plaza Yudikatif	30.000.000	-	-	-	-	-	-
9		Supplier	Pengadaan Material KCL	22.250.000	22.250.000	-	22.250.000	22.250.000	22.250.000	-
10	Toko Sumber Rejeki	Supplier	Pengadaan Material Bantu 30 Okt 2023	510.000	510.000	-	510.000	510.000	510.000	-
11		Supplier		-	-	-	-	-	-	-
12		Supplier		-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>UPAH</b>			-	-	-	-	-	-	-
1		Mandar		-	-	-	-	-	-	-
2		Mandar		-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>ALAT</b>			22.250.000	22.250.000	-	22.250.000	2.500.000	2.500.000	19.750.000
1	Abipraya Alat	Alat	Sewa Excavator CE-134-20	18.125.000	18.125.000	-	18.125.000	-	-	18.125.000
2	Abipraya Alat	Alat	Sewa Excavator CE-100-20	1.625.000	1.625.000	-	1.625.000	-	-	1.625.000
3	Jumardin	Alat	Sewa DT 30 Oktober 2023	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-
<b>D</b>	<b>Subkontraktor</b>			5.555.418.981	5.555.418.981	-	5.555.418.981	1.127.828.005	1.127.828.005	4.427.590.976
1	Acep Hasanuddin	Subkontraktor	Pekerjaan Jalan Akses	587.996.332	587.996.332	-	587.996.332	587.996.332	587.996.332	-
2	David Silitanga	Subkontraktor	Pekerjaan Soil Test	411.729.078	411.729.078	-	411.729.078	205.864.537	205.864.537	205.864.541
3	Acep Hasanuddin	Subkontraktor	Pekerjaan Jalan Akses Tahap II	99.575.949	99.575.949	-	99.575.949	99.575.949	99.575.949	-
4	Yiyi Adisp	Subkontraktor	Pekerjaan Jalan Akses Tahap III	234.391.187	234.391.187	-	234.391.187	234.391.187	234.391.187	-
5	PT Intisnar	Subkontraktor	PEMBANGUNAN LANSKAP PLAZA LEGISLATIF	4.221.728.435	4.221.728.435	-	4.221.728.435	-	-	4.221.728.435
	<b>TOTAL :</b>			<b>6.680.008.776</b>	<b>6.251.027.776</b>	<b>52.827.500</b>	<b>6.303.855.276</b>			<b>5.046.807.476</b>

No.	Nama Rekanan	enis Rekanan	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak	Realisasi				Utang + BAD	
					Utang		Pembayaran			Saldo Utang Usaha
					Oktober	Total	Oktober	Total		
<b>A</b>	<b>MATERIAL</b>			1.102.333,1			62.720,1	62.720,1	63.999,1	663.466,1
1	PT EDP Media Mulimitra Primanusa	Supplier	Pengadaan BIM	36.000.000	39.960.000	39.960.000	39.960.000	39.960.000	-	-
2	PT Mitra Sumber Energy Perkasa	Supplier	Pengadaan Solar Industri Tahap I	81.250.000	-	-	-	-	-	90.187.500
3	PT Ganendra Ansyila Semesta	Supplier	Pengadaan Material dan Alat Bantu Kerja	73.571.500	-	-	-	-	-	73.571.500
4	PT Ganendra Ansyila Semesta	Supplier	Pengadaan Material Hollow dan Pasir	32.777.500	-	-	-	-	-	32.777.500
5	Florensis Indah F	Supplier	Pengadaan APD	63.999.795	63.999.795	63.999.795	63.999.795	63.999.795	63.999.795	63.999.795
6	CV Azarindo Nusantara Aditya Tripta	Supplier	Pengadaan Modulir Direksi Keet	726.000.000	-	-	-	-	-	402.930.000
7	PT Daniswara Jaya Perkasa	Supplier	Pengadaan Alat Bantu Kerja	35.981.000	-	-	-	-	-	-
8	Syarifudin Wijaya	Supplier	Pengadaan Mebel Kantor Plaza Legislatif dan Plaza Yudikatif	30.000.000	-	-	-	-	-	-
9		Supplier	Pengadaan Material KCL	22.250.000	22.250.000	22.250.000	22.250.000	22.250.000	22.250.000	-
10	Toko Sumber Rejeki	Supplier	Pengadaan Material Bantu 30 Okt 2023	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	-
11		Supplier		-	-	-	-	-	-	-
12		Supplier		-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>UPAH</b>			-	-	-	-	-	-	-
1		Mandar		-	-	-	-	-	-	-
2		Mandar		-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>ALAT</b>			22.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	19.750.000
1	Abipraya Alat	Alat	Sewa Excavator CE-134-20	18.125.000	-	-	-	-	-	18.125.000
2	Abipraya Alat	Alat	Sewa Excavator CE-100-20	1.625.000	-	-	-	-	-	1.625.000
3	Jumardin	Alat	Sewa DT 30 Oktober 2023	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-
<b>D</b>	<b>Subkontraktor</b>			5.555.418.981	1.127.828.005	1.127.828.005	1.127.828.005	1.127.828.005	-	4.427.590.976
1	Acep Hasanuddin	Subkontraktor	Pekerjaan Jalan Akses	587.996.332	587.996.332	587.996.332	587.996.332	587.996.332	-	-
2	David Silitanga	Subkontraktor	Pekerjaan Soil Test	411.729.078	205.864.537	205.864.537	205.864.537	205.864.537	-	205.864.541
3	Acep Hasanuddin	Subkontraktor	Pekerjaan Jalan Akses Tahap II	99.575.949	99.575.949	99.575.949	99.575.949	99.575.949	-	-
4	Yiyi Adisp	Subkontraktor	Pekerjaan Jalan Akses Tahap III	234.391.187	234.391.187	234.391.187	234.391.187	234.391.187	-	-
5	PT Intisnar	Subkontraktor	PEMBANGUNAN LANSKAP PLAZA LEGISLATIF	4.221.728.435	-	-	-	-	-	4.221.728.435
	<b>TOTAL :</b>			<b>6.680.008.776</b>	<b>1.125.328.005</b>	<b>1.188.048.005</b>	<b>1.188.048.005</b>	<b>1.188.048.005</b>	<b>63.999.795</b>	<b>5.110.807.271</b>

PT Brantas Abipraya (Persero)

Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP Monitoring UM & Termijn

	Porsi	97,50%	2,50%
		PT Brantas Abipraya (Persero)	PT Indah Karya (Persero)
Nilai Kontrak	807.303.835.135,14	787.121.239.256,76	20.182.595.878,38
Nilai PPN	88.803.421.864,86	86.583.336.318,24	2.220.085.546,62
Total Kontrak	<u>896.107.257.000,00</u>	<u>873.704.575.575,00</u>	<u>22.402.681.425,00</u>

0,00 CTRL

No	Uraian Tagihan	Progress	DPP	Potongan		BAP Bln Ini	Potongan		Termijn Netto
				Retensi	Uang Muka		PPn (11%)	PPH (2,65%)	
	Uang Muka								
1	Uang Muka	134.416.088.550,00	121.095.575.270,27				13.320.513.280,00	3.209.032.744,66	117.886.542.525,61

## 6. Bagian Akuntansi kemudian Membuat Evaluasi Cash Basis

<b>EVALUASI CASH BASIS</b>		
<b>PERIODE S/D Oktober 2023</b>		
<b>No.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>TAHUN 2023</b>
		<b>S/D Oktober 2023</b>
<b>I</b>	<b>Biaya</b>	<b>2.498.788.588,69</b>
1	Alokasi	19.668.044.509,00
2	Pembebanan	132.303.619,49
3	Set. PPh 23	-
4	Realokasi	4.797.344,00
5	Saldo Akhir Kas Bank	17.296.762.195,80
6	Hutang SCF	-
<b>II</b>	<b>Penambah Biaya</b>	<b>5.412.234.681,90</b>
1	Saldo Hutang Supplier	663.466.295,00
2	Saldo Hutang Peralatan Ekstern	-
3	Saldo Hutang Peralatan Intern	19.750.000,00
4	Saldo Hutang Subkontraktor	4.427.590.976,04
5	Saldo Hutang Bass Borong	-
6	Saldo Biaya Segera Dibayar	-
7	Saldo Hutang PPh 21 & 23	301.427.410,86
8	Saldo Hutang Lain - lain	-
<b>III</b>	<b>Pengurang Biaya</b>	<b>486.899.453,00</b>
1	<b>Saldo Piutang</b>	<b>66.829.176,00</b>
	- Piutang Supplier	-
	- Piutang Subkontraktor	-
	- Piutang Pajak	52.827.500,00
	- Piutang Alat	-
	- Piutang lain- Lain	14.001.676,00
2	Saldo Panjar Kerja	-
3	Saldo Persediaan	-
4	Saldo Biaya Ditangguhkan	-
5	Saldo Biaya Dibayar Dimuka	420.070.277,00
<b>IV</b>	<b>Total Biaya ( 1 + 2 - 3 )</b>	<b>7.424.123.817,59</b>
<b>V</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>8.097.257.466,40</b>
1	Phisik	8.097.257.466,40
2	Eskalasi	
3	Klaim	
4	Lain-lain	
<b>VI</b>	<b>Kontribusi</b>	<b>673.133.649</b>
<b>VII</b>	<b>Prosentase</b>	<b>8,31%</b>

Berdasarkan gambar diatas, Proyek Sumbu Kebangsaan Tahap II Biaya secara cash yang telah dikeluarkan adalah sebesar 2,49 Miliar Rupiah. Hutang Usaha Proyek Kebangsaan Tahap II sebesar 5,41 Miliar. Piutang Usaha Proyek Kebangsaan Tahap II Sebesar 66 Juta dan Biaya Dibayar Dimuka sebesar

420 Juta Rupiah sehingga total biaya sebesar 7,42 Miliar. Pendapatan (Progress) yang telah dikerjakan adalah 8,31% atau sebesar 8,09 Miliar Rupiah.

7. Evaluasi Progress (Pendapatan) dan Biaya Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP

a. Progress Fisik

Uraian	Rencana (%) ( Ra )	Realisasi (%) ( Ri )	Dev ( Ra - Ri )
s/d Oktober 2023 Progres Fisik	0,35%	1,00%	0,658%

Kondisi Realisasi progress fisik s.d Oktober 2023 Mengalami kemajuan sebesar 0,657% dari rencana semula yang terutang pada RBP.

b. Pendapatan

NO.	URAIAN	Rencana (Ra)	Realisasi ( Ri )	Dev ( Ra - Ri )
	s/d Oktober 2023	<b>2.785,20</b>	<b>8.097,26</b>	<b>5.312,06</b>
	Pendapatan fisik	2.785,20	8.097,26	5.312,06
	Pendapatan eskalasi	-	-	-
	Pendapatan kompensasi	-	-	-

c. Biaya Material, Upah, dan Alat

NO.	URAIAN	Ra. Biaya Sesuai Vol. Ri	Realisasi sesuai Gipro/LO	Dev ( Ra - Ri )
	s/d September 2023			
	Biaya Material	-	-	-
	Biaya Upah	-	-	-
	Biaya Alat	-	-	-
	Total biaya	-	-	-
	Oktober 2023			
	Biaya Material	673,36	673,36	-
	Biaya Upah	-	-	-
	Biaya Alat	98,86	22,25	76,61
	Total biaya	772,22	695,61	76,61
	s/d Oktober 2023			
	Biaya Material	673,36	673,36	-
	Biaya Upah	-	-	-
	Biaya Alat	98,86	22,25	76,61
	Total biaya	772,22	695,61	76,61

Secara Keseluruhan total biaya Material, Upah, dan Alat mengalami Efisiensi sebesar 76,6 Juta Rupiah

## d. Biaya Subkontraktor

NO.	U R A I A N	Ra. Biaya Sesuai Vol. Ri	Realisasi sesuai ERP/LO	Dev ( Ra - Ri )
	s/d September 2023	-	-	-
	Oktober 2023	5.629,05	5.555,42	73,63
	s/d Oktober 2023	5.629,05	5.555,42	73,63

Berdasarkan gambar diatas Biaya Subkontraktor efisiensi sebesar 73,63 Juta Rupiah, sehingga proyek harus mempertahankan untuk bulan berikutnya

## e. Biaya Persiapan dan Penyelesaian

NO.	U R A I A N	Ra. Biaya Sesuai RBP	Realisasi sesuai ERP/LO	Dev ( Ra - Ri )
	s/d September 2023	-	-	0
	Oktober 2023	342,22	342,22	-
	s/d Oktober 2023	342,22	342,22	-

Biaya Persiapan & Penyelesaian over Rp. 0 Juta, biaya yang ada telah sesuai dengan plafon dana yang ada.

## f. Biaya Umum

NO.	U R A I A N	Ra. Biaya Sesuai RBP	Realisasi sesuai ERP/LO	Dev ( Ra - Ri )
	s/d September 2023	-	-	-
	Oktober 2023	605,70	679,95	(74,25)
	s/d Oktober 2023	605,70	679,95	(74,25)

Biaya Umum Proyek Over sebesar 74,25 Juta Rupiah, biaya yang ada telah sesuai dengan plafon dana yang ada. Biaya Umum over diakibatkan banyaknya pengeluaran pada Transportasi dan Akomodasi Tamu.

## g. Efisiensi &amp; Pembengkakan Biaya

NO.	U R A I A N	OVER	EFISIENSI	Total
	<b>s/d September 2023</b>			
	Biaya Material	-	-	-
	Biaya Umum	-	-	-
	Biaya bank	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-
	<b>Oktober 2023</b>			
	Biaya Material	-	-	-
	Biaya Upah	-	-	-
	Biaya Alat	-	76,61	76,61
	Biaya Sub Kon	-	73,63	73,63
	Biaya Pers. & Peny	-	-	-
	Biaya Umum	74,25	-	(74,25)
	Biaya bank	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>74,25</b>	<b>150,23</b>	<b>75,99</b>
	<b>s/d Oktober 2023</b>			
	Biaya Material	-	-	-
	Biaya Upah	-	-	-
	Biaya Alat	-	76,61	76,61
	Biaya Sub Kon	-	73,63	73,63
	Biaya Pers. & Peny	-	-	-
	Biaya Umum	74,25	-	(74,25)
	Biaya bank	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>74,25</b>	<b>150,23</b>	<b>75,99</b>

Berdasarkan Gambar diatas secara keseluruhan biaya Proyek sumbu kebangsaan tahap II over sebesar 74 Juta Rupiah terletak pada biaya umum bersamaan dengan itu Proyek mengalami efisiensi pada biaya alat dan subkontraktor sehingga proyek mengalami efisiensi sebesar 75,99 Juta Rupiah di periode Oktober 2023.

## h. Kontribusi Proyek

NO.	U R A I A N	Ra. Biaya Sesuai Vol. Ri	Realisasi sesuai ERP/LO	Dev ( Ri - Re )
	<b>s/d September 2023</b>	-	-	-
	<b>Oktober 2023</b>	533,49	673,13	139,64
	<b>s/d Oktober 2023</b>	533,49	673,13	139,64

## i. Perbandingan Pengeluaran Kas dan Pendapatan

Uraian	Pengeluaran ( A )	Pendapatan ( B )	Ratio ( A / B )
s/d Oktober 2023 Realisasi	2.498,79	8.097,26	<b>30,86%</b>

Berdasarkan gambar diatas Proyek Sumbu Kebangsaan Tahap II memiliki rasio sebesar 30,86% sehingga dapat dikategorikan Baik.

### PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Permasalahan dalam kegiatan administrasi bagian pajak, saat merubah status pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak. Abipraya-Indah,KSO mendapatkan penolakan status Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara dikarenakan PT Indah Karya (Persero) mempunyai Utang Pajak. Tindak lanjut, Hal tersebut membuat tim Pajak Proyek Abipraya-Indah,KSO dan PT Indah Karya (Persero) harus menghadap ke KPP Pratama Jakarta Jatineraga untuk membuat kesepakatan bersama KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Perusahaan harus memerhatikan kewajiban perpajakannya baik itu setor/bayar pajak pph 21, 23, dan 4 ayat 2 selain itu Perusahaan wajib melaporkan bukti setor ke DJP.

Permasalahan dalam kegiatan administrasi bagian keuangan, fasilitas perbankan penerbitan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka memerlukan kekuatan *financial* yang cukup sehingga PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Indah Karya (Persero) harus mempunyai modal kerja sesuai porsi kontrak untuk menerbitkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka. PT Indah Karya (Persero) mempunyai kendala modal kerja dikarenakan sedang mengalami kesulitan *financial* sehingga PT Brantas Abipraya (Persero) menanggung dan membiayakan semua biaya penerbitan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dikarenakan PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan leader dari Proyek Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP dengan besaran porsi 97,5% sedangkan PT Indra Karya (Persero) sebesar 2,5%. PT Brantas Abipraya (Persero) menanggung dan membiayakan semua biaya penerbitan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dengan kesepakatan bersama oleh lima Direksi beserta SVP Divisi Operasi 1, SVP Departemen Keuangan dan Sekretaris PT Brantas Abipraya (Persero). Fasilitas perbankan bagi pembiayaan melalui *Supply Chain Financing* (SCF) mengalami kendala dengan isu yang beredar mengenai Perusahaan-perusahaan BUMN Karya Indonesia sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga Proyek ini hanya mendapatkan fasilitas Pembiayaan SCF Bank Mandiri sebesar 60%, sehingga proyek harus memikirkan 40% sisa pembiayaan yang tidak ditanggung oleh fasilitas Bank Mandiri.

Beberapa Permasalahan pada Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP. Berikut tabel permasalahan yang ada pada periode Oktober 2023 Proyek Sumbu Kebangsaan Tahap II.

No.	Permasalahan	Penyebab	Tindak Lanjut
1	RUP pengadaan belum bisa dilaksanakan secara masif dan struktur karena masih proses design.	Belum finalnya Design dikarenakan menunggu approve RI 1	Melakukan pengadaan secara parsial sesuai permintaan pekerjaan
2	<i>Cross Bridge</i>	<i>Cross Bridge</i> Sisi Utara dari Plaza Bhineka A masuk area pekerjaan paket lain	Diskusi bersama MKI dengan paket-paket terkait bersama dengan MK masing-masing paket untuk menjadwalkan memulai sampai penyelesaian pekerjaan
3	Lokasi Pos Pemadam Kebakaran	Pergeseran titik pos - pos pemadam kebakaran	Diskusi bersama MKI dengan paket-paket terkait bersama dengan MK masing-masing paket untuk menjadwalkan memulai sampai penyelesaian pekerjaan
4	Master Plan	Master Plan yang belum disetujui oleh pemberi kerja	Revisi sesuai arahan pemberi kerja dan menunggu approval RI 01
5	Personil	Belum adanya SQM dan SOM area Sistem Proteksi Kebakaran	Mengajukan permohonan kebutuhan pegawai ke Divisi dan HC Derpartement
6	Cuaca	Curah hujan yang tinggi mengakibatkan terhambatnya proses konstruksi	Memaksimalkan Pekerjaan pada saat cuaca cerah

## KESIMPULAN

Kegiatan Administrasi Keuangan, Akuntansi, Pajak, SDM, dan Umum pada Proyek Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada. Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat tim pemasaran PT Brantas Abipraya (Persero) mengikuti proses tender Proyek yang beberapa kemampuan dasar PT Brantas Abipraya (Persero) belum memenuhi kualifikasi Proyek tersebut maka PT Brantas Abipraya (Persero) perlu menggandeng Perusahaan lain untuk menjalin kerja sama operasi. Hal yang wajib diperhatikan tidak hanya kemampuan kualifikasi konstruksi perusahaannya, namun aspek-aspek perpajakan dan *financial* wajib diperhatikan sehingga pada saat merubah status pajak dapat dengan mudah diproses serta penerbitan fasilitas perbankan dapat diproses sesuai dengan porsi kontraknya dan tidak memberatkan salah satu pihak.
- b. Selain itu fasilitas perbankan terkendala dengan fasilitas pembiayaan hanya 60% dari nilai kontrak. Untuk permasalahan fasilitas pembiayaan SCF, sebaiknya tidak harus selalu bergantung pada fasilitas tersebut. PT Brantas Abipraya (Persero) dapat menggunakan sistem *hard cash* untuk beberapa item pekerjaan pokok.
- c. Kekurangan personil proyek menjadi kendala yang harus di perhatikan bagian sdm, sehingga sdm wajib untuk terus aktif melakukan rekrutmen dan membuat permohonan pengajuan kebutuhan pegawai ke Divisi dan HC Departement.
- d. Wajib memperhatikan kelengkapan dokumen dan kepatuhan perpajakan baik dari proyek maupun rekanan proyek, agar memudahkan Proyek Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP untuk melakukan Restitusi PPn, Restitusi PPn merupakan salah satu sumber penerimaan (*cash in*) bagi Proyek. Rekanan wajib menginformasikan surat setoran pajak dan bukti lapor, bagian keuangan proyek wajib berkoordinasi ke rekanan secara berkala. Tidak menutup kemungkinan adanya supervisi khusus, audit dari instansi pemerintahan seperti BPKP, BPK dan Kejaksaan sehingga semua bukti pendukung administrasi harus lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- R. Akbar and J. Juliastrioza, “Penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) untuk Sistem Informasi Pembelian, Persediaan dan Penjualan Barang pada Toko EMI GROSIR dan ECERAN,” *J. Nas. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 7–17, 2015, doi: 10.25077/teknosi.v1i1.2015.7.
- C. A. Lestari, “Implementasi Odoo Dengan Modul Accounting and Finance Di SD Islam Tunas Mandiri,” *J. Inform. Terpadu*, vol. 3 No.1, pp. 1–6, 2017.
- PT. Brantas Abipraya (Persero). (2020). Pembuatan Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek No. Dokumen 2-000-43-08/04.
- PT. Brantas Abipraya (Persero). (2020). Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Proyek No. Dokumen 2-000-43-08/04.
- PT. Brantas Abipraya (Persero). (2020). Prosedur Rencana Kebutuhan Dana Kerja dan Biaya Administrasi Umum No. Dokumen 2-000-43-01/10
- PT. Brantas Abipraya (Persero). (2020). Prosedur Pengelolaan Dana Perusahaan No. Dokumen 2-000-56-03/09
- PT. Brantas Abipraya (Persero). (2020). Prosedur Penerbitan Instrumen Keuangan No. Dokumen 2-000-56-04/07
- PT. Brantas Abipraya (Persero). (2021). Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan No. Dokumen 2-000-56-02/10
- PT. Brantas Abipraya (Persero). (2021). Prosedur Pelaksanaan Perpajakan No. Dokumen 2-000-56-01/12
- Munawir, S. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Harahap, Sofyan S. 2006. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja
- ONLINEPAJAK. (2022, Oktober 22). Pajak Pertambahan Nilai. Retrieved Januari 5, 2022, from Online-pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- ONLINEPAJAK. (2022, Oktober 24). Cara Perhitungan PPh Pasal 21. Retrieved Januari 5, 2022, from Online-pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph-21>